

Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian: Peningkatan Layanan, Akurasi Pengawasan Visa & Izin Tinggal di Indonesia

Ahnaf Arib Saputra A¹, Hastrid Aulia Nesken², Elvira Rossi³, Eunike Leoni S⁴, Bitya
Claudine Ginting M⁵, Brains Mordechai Dalipang F⁶

^{1,2,3,4,5,6} Manajemen Teknologi Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia

e-mail: ahnafputra1977@gmail.com¹, hastrid151@gmail.com², diyelvira@gmail.com³,
sinaga2nike@gmail.com⁴, bityaclaudine@gmail.com⁵, brainsj42@gmail.com⁶

Abstrak

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) memegang peran krusial dalam upaya modernisasi layanan dan pengawasan keimigrasian di Indonesia, kendati pemahaman mendalam mengenai efektivitas fungsional dan dampak praktisnya masih perlu digali lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan memahami secara mendalam efektivitas implementasi SIMKIM, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan visa dan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) serta peningkatan akurasi pengawasan WNA di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, hasil sintesis menunjukkan SIMKIM berkontribusi positif pada efisiensi administratif dan transparansi pelayanan, serta mendukung deteksi dini dalam pengawasan. Namun, efektivitasnya belum optimal dan merata akibat tantangan infrastruktur, SDM, koordinasi, dan keterbatasan fungsional. Disimpulkan bahwa evaluasi berkelanjutan dan penelitian kualitatif mendalam dibutuhkan untuk optimalisasi SIMKIM ke depan.

Kata kunci: *Efektivitas, Pelayanan Keimigrasian, Pengawasan WNA, Sistem Informasi*

Abstract

The implementation of the Immigration Management Information System (SIMKIM) plays a crucial role in modernizing immigration services and supervision in Indonesia, although a deeper understanding of its functional effectiveness and practical impacts still needs further exploration. This study aims to explore and deeply understand the effectiveness of SIMKIM implementation, particularly in enhancing the quality of visa and stay permit services for Foreign Nationals (FN) and improving the accuracy of FN supervision in Indonesia. Using a qualitative approach with a literature review method, the synthesis of findings shows that SIMKIM positively contributes to administrative efficiency and service transparency, and supports early detection in supervision. However, its effectiveness is not yet fully optimal or evenly distributed due to infrastructural, human resources, coordination, and functional limitation challenges. It is concluded that continuous evaluation and in-depth qualitative research are needed for future SIMKIM optimization.

Keywords : *Effectiveness, Immigration Services, Foreign Nationals Supervision, Information System*

PENDAHULUAN

Berbagai aspek seperti globalisasi ekonomi, peningkatan signifikan dalam sistem transportasi dan teknologi komunikasi, serta peningkatan citra media di seluruh dunia, merupakan faktor kunci untuk memahami pola migrasi kontemporer yang secara kolektif telah mendorong pergerakan populasi internasional menjadi lebih masif dan beragam. Fenomena ini tercermin dari jumlah orang yang bermigrasi lintas negara yang mencapai titik tertinggi, melibatkan spektrum asal dan destinasi yang lebih luas dari sebelumnya. Kemudahan akses terhadap informasi global mengenai peluang ekonomi, pendidikan, dan standar hidup yang lebih baik di berbagai penjuru

dunia, yang disebarkan secara luas melalui kemajuan teknologi komunikasi dan media modern, terbukti secara signifikan memperkuat baik aspirasi maupun kemampuan individu beserta keluarganya untuk mengambil keputusan melakukan migrasi lintas negara.

Menanggapi kompleksitas dan peningkatan volume migrasi internasional, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, mengembangkan berbagai instrumen kebijakan untuk mengelola pergerakan manusia. Salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan tersebut di Indonesia terwujud dalam Fungsi Keimigrasian, yang didefinisikan sebagai "bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat" [1]. Penting bagi Imigrasi mengelola mobilitas penduduk (wisata, pendidikan, kerja) demi layanan publik yang efektif dan terbuka [2]. Pengelolaan mobilitas penduduk yang menyeluruh oleh Imigrasi merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan sistem layanan publik yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi. Dengan adanya manajemen yang terstruktur dan data yang akurat, Imigrasi dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, mempercepat proses layanan, serta memastikan bahwa setiap prosedur dan kebijakan dapat diakses dan dimengerti dengan mudah oleh masyarakat luas, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik.

Era industrialisasi 5.0, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasinya, membawa perubahan signifikan di semua aspek kehidupan masyarakat [3]. Salah satu dampak paling krusial adalah bagaimana kemajuan TIK kini menjadi instrumen penting yang mempercepat kemajuan layanan publik di berbagai bidang, termasuk layanan keimigrasian yang semakin mengandalkan sistem daring untuk efisiensi dan kemudahan akses. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) merupakan salah satu inisiatif penting yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi manajemen dalam pelayanan keimigrasian dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pelayanan keimigrasian. Dalam konteks penerapan SIMKIM, penelitian oleh Kusuma menunjukkan bahwa sistem ini telah diterapkan di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta selama lebih dari lima tahun, dan memerlukan evaluasi mendalam untuk mengukur efektivitasnya [4]. Sistem ini bertujuan untuk membuat proses yang terstruktur dalam mengumpulkan dan menganalisis kinerja pegawai, agar transparansi dan akuntabilitas di dalam organisasi semakin meningkat [5]. Implementasi SIMKIM menjadi langkah strategis karena bisa meminimalkan bias. Transparansi yang dihasilkan dari proses yang jelas ini akan memupuk kepercayaan dan akuntabilitas yang terbangun akan mendorong setiap pegawai untuk berkontribusi aktif demi kemajuan bersama.

Pengawasan WNA dan imigran ilegal merupakan isu lintas batas sensitif di Asia Pasifik, dengan modus penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan oleh WNA untuk tinggal di Indonesia dan melakukan pelanggaran imigrasi seperti penyalahgunaan izin tinggal, overstay, imigrasi ilegal, pemalsuan dokumen, hingga kejahatan siber [6]. Dampak dari penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial dan keamanan, mengingat beberapa di antaranya terhubung dengan jaringan kejahatan terorganisir. Kepuasan pelayanan dipengaruhi oleh fasilitas fisik, lingkungan pelayanan, waktu tunggu, dan manfaat layanan [7]. Bagi imigrasi, pengelolaan proaktif terhadap kualitas fasilitas fisik, penciptaan lingkungan pelayanan yang kondusif, optimalisasi waktu tunggu, serta penjaminan relevansi dan efektivitas manfaat layanan merupakan serangkaian tindakan esensial yang bertujuan untuk memaksimalkan tingkat kepuasan pemohon visa dan izin tinggal.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian menuntut evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitasnya dalam menjawab tantangan, meningkatkan layanan, dan akurasi pengawasan [4]. Penilaian mendalam atas fungsionalitas serta dampak praktisnya menjadi esensial, sebab keberadaan sistem semata tidaklah cukup. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) memegang peranan krusial dalam upaya modernisasi layanan dan pengawasan keimigrasian di Indonesia. Meskipun demikian, pemahaman mendalam mengenai bagaimana SIMKIM berfungsi dalam praktik, apa saja dampaknya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dari perspektif para pemangku kepentingan (petugas imigrasi dan pengguna layanan) masih perlu digali lebih lanjut. Hal ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkelanjutan

terhadap efektivitas sistem tersebut dalam menjawab tantangan, khususnya terkait fungsionalitas dan dampak praktisnya dalam meningkatkan layanan dan akurasi pengawasan.

Oleh karena itu, penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam (bagaimana dan mengapa) efektivitas implementasi SIMKIM. Fokus utama evaluasi akan diarahkan pada dua domain sentral: pertama, peningkatan kualitas pelayanan visa dan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA); dan kedua, peningkatan akurasi serta efektivitas pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di Indonesia. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi nyata SIMKIM, sekaligus mengidentifikasi area-area strategis yang memerlukan perbaikan guna mengoptimalkan fungsi sistem ini ke depan, sehingga memberikan masukan konstruktif untuk pengembangan SIMKIM dan kebijakan terkait.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (literature review) yang mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih untuk dapat mengeksplorasi dan memahami secara komprehensif efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sebagaimana direfleksikan dalam berbagai literatur ilmiah. Fokus utama adalah menganalisis dan mensintesis temuan-temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran mengenai kontribusi nyata SIMKIM terhadap peningkatan kualitas pelayanan visa dan izin tinggal, serta peningkatan akurasi pengawasan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Kualitas pelayanan yang baik terbukti meningkatkan kepuasan pemohon visa dan izin tinggal secara signifikan. Gofur dalam penelitiannya memperlihatkan hubungan positif antara kualitas pelayanan dan kepuasan pemohon, yang menegaskan bahwa perbaikan kualitas layanan berkontribusi pada kepuasan yang lebih tinggi di sektor pelayanan umum [8].

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang seluruhnya berasal dari literatur ilmiah. Literatur tersebut mencakup artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik efektivitas SIMKIM, pelayanan keimigrasian, dan pengawasan keimigrasian di Indonesia. Sumber-sumber ini akan diidentifikasi melalui basis data akademik daring (seperti Google Scholar, SINTA, Garuda, dan repositori institusi) serta penelusuran manual dari daftar referensi artikel yang relevan.

Strategi Pencarian dan Seleksi Literatur

Proses pengumpulan literatur dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penentuan Kata Kunci: Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi: "Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian", "SIMKIM", "efektivitas SIMKIM", "pelayanan keimigrasian Indonesia", "pengawasan WNA Indonesia", "evaluasi sistem informasi imigrasi", "kualitas layanan imigrasi", "visa dan izin tinggal Indonesia".
- 2) Kriteria Inklusi: Literatur yang disertakan dalam analisis memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Membahas secara spesifik tentang SIMKIM di Indonesia.
 - b. Menyajikan data atau analisis terkait efektivitas, implementasi, dampak, tantangan, atau evaluasi SIMKIM.
 - c. Berfokus pada aspek kualitas pelayanan visa dan izin tinggal, dan/atau akurasi pengawasan WNA.
 - d. Dipublikasikan dalam rentang waktu 15 tahun terakhir untuk memastikan aktualitas, terutama sejak SIMKIM diimplementasikan dan dievaluasi.
- 3) Kriteria Eksklusi: Literatur yang tidak disertakan adalah yang hanya menyebut SIMKIM secara sepintas tanpa analisis mendalam, bersifat opini tanpa dasar penelitian, atau tidak relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten (content analysis) atau analisis tematik (thematic analysis) terhadap literatur yang terkumpul. Proses analisis melibatkan langkah-langkah berikut:

- 1) Pembacaan dan Pemahaman Mendalam: Membaca secara cermat seluruh literatur yang terpilih untuk memahami konteks, metodologi, temuan utama, dan kesimpulan dari masing-masing studi.
- 2) Ekstraksi Data: Mengidentifikasi dan mengekstrak informasi relevan dari setiap literatur terkait dengan:
 - a. Fungsionalitas dan praktik penggunaan SIMKIM.
 - b. Dampak implementasi SIMKIM terhadap kualitas pelayanan seperti efisiensi waktu dan kemudahan akses.
 - c. Peran SIMKIM dalam mendukung akurasi dan efektivitas pengawasan keimigrasian.
 - d. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi SIMKIM.
 - e. Tantangan yang dihadapi dan rekomendasi yang diajukan dalam literatur.
- 3) Pengkodean dan Kategorisasi: Memberikan kode pada segmen-segmen data yang relevan dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori atau tema-tema yang muncul. Tema ini akan merujuk pada aspek-aspek seperti efektivitas sistem informasi, adopsi teknologi di sektor publik, dan peran teknologi dalam pengawasan.
- 4) Sintesis Temuan: Mensintesis temuan dari berbagai literatur untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas SIMKIM. Ini melibatkan perbandingan temuan antar studi, identifikasi pola, konsistensi, atau bahkan kontradiksi dalam literatur.
- 5) Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan hasil sintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana dan mengapa SIMKIM efektif atau tidak efektif, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penelitian lebih lanjut.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai evaluasi efektivitas SIMKIM berdasarkan bukti-bukti yang telah dipublikasikan dalam berbagai kajian ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi dan Realitas Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui SIMKIM

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) menunjukkan potensi signifikan dalam mentransformasi kualitas pelayanan keimigrasian di Indonesia. Berbagai studi mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi dan transparansi, meskipun sejumlah tantangan masih perlu diatasi.

- a. Peningkatan Efisiensi dan Aksesibilitas: SIMKIM dilaporkan menyederhanakan kinerja pegawai dan memperlancar proses pendaftaran izin tinggal, menjadikannya lebih cepat bagi masyarakat [9]. Hal ini tentu meningkatkan efisiensi berbagai pihak. Sistem ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan melalui kecepatan, akurasi, dan efektivitas [10]. Harapannya, SIMKIM bisa menjadi penggerak reformasi birokrasi bagi imigrasi. Pengembangan SIMKIM oleh Ditjen Imigrasi mengintegrasikan fungsi keimigrasian domestik dan internasional, memungkinkan verifikasi identitas yang cepat dan akurat melalui konektivitas ke berbagai database [11]. Dengan integrasi, pengambilan keputusan akan lebih singkat. Hal ini diharapkan memotong waktu verifikasi secara drastis dan menstandarisasi keamanan penerbitan paspor serta visa [11]. Salah satunya untuk mencegah penyalahgunaan visa dan izin tinggal. Akses informasi layanan juga dinilai menjadi lebih mudah melalui berbagai platform digital, memungkinkan pengguna mengikuti alur layanan dengan jelas dan transparan, termasuk kepastian durasi layanan dan biaya [12]. Pemohon visa dan izin tinggal tidak perlu khawatir akan perbedaan persyaratan karena informasi layanan sudah transparan.
- b. Tantangan Implementasi: Meskipun demikian, penerapan SIMKIM menghadapi kendala, terutama di wilayah terpencil yang terkendala aksesibilitas transportasi dan konektivitas jaringan internet [13]. Biasanya terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau bahkan di wilayah lain yang tidak memiliki akses dengan perkotaan sekitar. Studi oleh Mas'adi [11] menyoroti bahwa di samping kemajuan dalam percepatan layanan dan akurasi verifikasi, tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, disparitas keahlian SDM, resistensi terhadap inovasi, serta isu keamanan dan kerahasiaan data. Tantangan

yang biasanya terjadi dalam pelayanan publik di semua bidang. Kebutuhan untuk peningkatan infrastruktur, modernisasi perangkat, pengembangan kompetensi digital personel, adaptasi publik, dan sosialisasi sistem pelayanan digital juga menjadi catatan penting [11]. Lebih lanjut, Zulfikar [13] mencatat bahwa penerbitan Pas Lintas Batas masih dilakukan dengan cara manual dan tidak terintegrasi dengan SIMKIM, mengakibatkan data tidak terpusat. Masih ada kendala terkait sarana prasarana untuk menerbitkan Pas Lintas Batas di daerah terpencil. Pemeriksaan imigrasi di beberapa Pos Lintas Batas terpencil juga masih manual akibat limitasi jaringan dan sumber daya [13]. Menjadi sedikit catatan karena hal tersebut tidak terintegrasi dengan SIMKIM.

Kontribusi SIMKIM terhadap Akurasi dan Efektivitas Pengawasan Keimigrasian

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akurasi data dan efektivitas pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Literatur yang dikaji menunjukkan peran penting SIMKIM dalam deteksi dini, dukungan terhadap penegakan kebijakan selektif, integrasi dengan sistem pengawasan lain, serta efektivitas operasi pengawasan, meskipun diiringi dengan sejumlah tantangan implementasi.

- a. **Kualitas dan Ketersediaan Data WNA untuk Deteksi Dini**
Petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) memegang peranan krusial dalam menjalankan proses deteksi dini WNA. Hal ini dilakukan melalui tahapan pengolahan data orang asing seperti paspor dan visa, serta analisis mendalam terhadap informasi yang akurat dan terintegrasi dengan SIMKIM [14]. Ketersediaan data yang valid dan terpusat dalam SIMKIM menjadi fondasi penting bagi petugas untuk membuat penilaian awal yang cepat dan tepat mengenai WNA yang masuk atau berada di wilayah Indonesia.
- b. **Dukungan terhadap Deteksi Pelanggaran dan Kebijakan Selektif**
Untuk mendukung deteksi pelanggaran, sistem seperti Border Control Management (BCM) berfungsi melakukan pengecekan terkait daftar pencegahan dan penangkalan (cegah tangkal) di TPI terhadap individu yang berpotensi bermasalah dengan hukum [15]. Dengan adanya Aplikasi Pemeriksaan Keimigrasian (APK) yang terintegrasi, petugas Imigrasi dengan mudah bisa merekam data dan memutuskan apakah seseorang yang ingin melewati TPI termasuk dalam daftar cegah tangkal atau tidak, sehingga prinsip kebijakan selektif (Selective Policy) dapat diterapkan secara lebih efektif [15]. APK secara otomatis menjalankan pengecekan atas data penumpang, mencakup data dokumen perjalanan, serta data nama penumpang dalam daftar cegah tangkal melalui sistem Enhance Cekal System (ECS), dengan hasilnya langsung muncul pada kolom 'Result' [15]. Meskipun demikian, studi menunjukkan bahwa sekalipun SIMKIM telah terintegrasi dengan sistem aplikasi untuk proses pemeriksaan keimigrasian di TPI bandara internasional di Indonesia, sistem tersebut dilaporkan belum mampu sepenuhnya mendeteksi paspor palsu [15].
- c. **Integrasi dengan Sistem Pengawasan Lain**
Upaya peningkatan pengawasan juga dilakukan melalui kerjasama lintas lembaga. Direktorat Jenderal Imigrasi diketahui melakukan kolaborasi dengan NCB Interpol melalui pemasangan aplikasi I-24/7. Aplikasi ini berfungsi sebagai pendeteksi data dokumen penting dan terintegrasi dengan sistem Border Control Management (BCM) [16]. Integrasi semacam ini krusial untuk memperluas jangkauan deteksi dan memastikan data yang digunakan dalam pengawasan komprehensif.
- d. **Efektivitas Operasi Pengawasan: Dalam mewujudkan model kontrol keimigrasian yang optimal, informasi dan data yang diperoleh melalui operasi intelijen keimigrasian memegang peranan penting. Data intelijen ini hendaknya dapat digunakan secara efektif untuk menunjang fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang lebih mendalam [16]. Peran petugas imigrasi di TPI kembali ditekankan sebagai ujung tombak dalam deteksi dini, dengan memanfaatkan pengolahan data WNA dari paspor dan visa, serta analisis informasi akurat yang terintegrasi dengan SIMKIM [14].**
- e. **Tantangan dalam Pengawasan Berbasis SIMKIM**
Meskipun memiliki potensi besar, penerapan SIMKIM untuk pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Kusuma [4] mengungkapkan bahwa

penerapan SIMKIM belum optimal, penyebabnya kendala dari sistem itu sendiri seperti kecepatan akses, serta faktor eksternal seperti belum tersedianya data kependudukan yang lengkap dan terintegrasi. Jaringan internet yang tidak stabil juga menjadi masalah, menyebabkan waktu proses menjadi lebih lama dan berpengaruh pada pengguna layanan keimigrasian [4]. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi pendukung dilaporkan membuat pelayanan dan pengawasan yang dihasilkan menjadi kurang maksimal [4]. Dari sisi data, informasi yang tersedia di Imigrasi terkadang masih terbatas pada data berbentuk tabel, yang akan mempersulit petugas dalam menjalankan pencarian data WNA ketika volume data semakin bertambah banyak [17]. Tantangan lain berkaitan dengan peningkatan aplikasi atau website manajemen sistem informasi, baik dari sisi fitur pengelolaan data penerima manfaat maupun kebutuhan pelatihan staf dalam pengoperasiannya [18].

Sintesis literatur mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Indonesia memperlihatkan sebuah lanskap yang kompleks, di mana potensi transformatif sistem berhadapan dengan berbagai realitas implementasi di lapangan. Di satu sisi, SIMKIM diakui membawa kemajuan signifikan dalam upaya modernisasi pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Namun, di sisi lain, efektivitasnya dalam mencapai tujuan secara menyeluruh masih dipengaruhi oleh serangkaian faktor internal organisasi, tantangan teknis, hingga kondisi eksternal yang dinamis. Sejalan dengan ini, menurut Fountain [19], tantangan esensial dalam e-government bukanlah pada aspek teknis pembuatan layanan digital, melainkan pada reorganisasi tata kelola institusional yang menjadi landasan operasionalnya. Pembahasan ini bertujuan menginterpretasikan temuan-temuan tersebut dalam kerangka konseptual efektivitas sistem informasi, teori adopsi teknologi di sektor publik, serta implikasinya terhadap transformasi pelayanan publik dan fungsi pengawasan keimigrasian.

1. Menginterpretasi Efektivitas SIMKIM: Sebuah Gambaran Multidimensi

Temuan dari berbagai studi secara konsisten menunjukkan bahwa SIMKIM telah memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi waktu dan proses dalam pelayanan keimigrasian. Laporan mengenai kelancaran dan percepatan proses pendaftaran izin tinggal [9] sejalan dengan tujuan dasar implementasi sistem informasi untuk meningkatkan kinerja operasional dan responsivitas organisasi [10]. Kemampuan SIMKIM untuk mengintegrasikan fungsi keimigrasian serta melakukan verifikasi identitas secara cepat melalui konektivitas ke berbagai database [11] mencerminkan upaya pencapaian target efektivitas melalui pengambilan keputusan yang lebih bermutu dan respons yang lebih cepat, sebagaimana dijelaskan dalam konsep umum efektivitas sistem informasi. Peningkatan kemudahan akses informasi dan transparansi juga menjadi dampak positif yang dilaporkan oleh Sefitri dkk. [12], selaras dengan ekspektasi terhadap sistem informasi dalam pemerintahan yang mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban. Kepastian durasi layanan dan biaya yang transparan berpotensi meningkatkan kepuasan pengguna, sebuah dimensi kualitatif dari efektivitas pelayanan yang juga dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem sebagaimana dijelaskan dalam Model Penerimaan Teknologi [20]. Namun, temuan mengenai tantangan implementasi [13, 11] mengindikasikan bahwa efektivitas SIMKIM belum merata dan optimal. Kendala infrastruktur di daerah terpencil, disparitas keahlian SDM, resistensi terhadap inovasi, serta isu keamanan data menjadi penghambat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* dari SIMKIM mungkin belum sepenuhnya tercapai bagi sebagian petugas dan di beberapa lokasi, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas sistem secara keseluruhan. Keterbatasan dalam deteksi paspor palsu [15] dan masih berlangsungnya proses manual untuk Pas Lintas Batas [13] juga menunjukkan adanya area fungsionalitas di mana SIMKIM belum mampu memenuhi targetnya secara penuh.

2. SIMKIM dalam Dinamika Adopsi Teknologi Sektor Publik

Berbagai tantangan implementasi SIMKIM yang teridentifikasi dalam literatur, seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kompetensi SDM, dan resistensi terhadap perubahan [11, 4], sangat relevan dengan kerangka Teori Adopsi Teknologi di Sektor

Publik. Secara khusus, hal ini sejalan dengan teori Difusi Inovasi [21] dan tantangan-tantangan yang umum dihadapi dalam birokrasi. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang tidak stabil [13, 4] merupakan manifestasi dari aspek kesiapan infrastruktur yang menjadi salah satu faktor penentu krusial dalam keberhasilan implementasi sistem. Isu kompetensi SDM dan kebutuhan akan pelatihan yang berkelanjutan [22, 11] mencerminkan pentingnya aspek "kemampuan SDM" dalam teori adopsi. Resistensi terhadap perubahan, meskipun tidak secara eksplisit dilabeli demikian dalam semua studi, dapat tersirat dari masih digunakannya proses manual untuk beberapa jenis layanan seperti Pas Lintas Batas [13] atau dari tantangan adaptasi publik terhadap sistem digital [11]. Kurangnya koordinasi antar instansi pendukung yang dilaporkan oleh Kusuma [4] juga merupakan faktor eksternal yang seringkali menghambat efektivitas sistem informasi dalam sektor publik, di mana interoperabilitas sistem dan dukungan regulasi serta kelembagaan yang kuat menjadi prasyarat penting.

3. Implikasi SIMKIM terhadap Transformasi Pelayanan dan Akurasi Pengawasan Keimigrasian

SIMKIM sebagai sebuah inovasi digital tidak diragukan lagi telah membawa perubahan signifikan dari sistem manual ke sistem yang terkomputerisasi dan daring. Peningkatan efisiensi administratif dan transparansi informasi layanan merupakan indikasi awal dari transformasi ini. Namun, sejauh mana SIMKIM telah berhasil mentransformasi manajemen keimigrasian secara holistik, bukan hanya sekadar mendigitalisasi proses-proses yang sudah ada, masih menjadi pertanyaan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Perspektif ini didukung oleh konsep Digital Era Governance (DEG) dari Dunleavy dkk. [23], yang menyatakan bahwa modernisasi pemerintahan berpusat pada perubahan fundamental berbasis IT yang memungkinkan mode operasi sepenuhnya digital. Dalam pandangan mereka, transformasi ini begitu mendasar hingga sebuah instansi dapat diibaratkan menjadi situs webnya sendiri, yang tidak hanya mengubah proses internal tetapi juga merefleksikan dan merespons dinamika digital yang lebih luas di masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa meskipun data WNA kini lebih terpusat, tantangan seperti keterbatasan fitur analitik data tersirat dari penyajian data yang masih berbentuk tabel dan menyulitkan pencarian dalam volume besar [17] serta belum mampunya sistem mendeteksi paspor palsu secara menyeluruh [15] mengindikasikan bahwa potensi SIMKIM sebagai instrumen pengawasan yang proaktif dan prediktif mungkin belum tergali sepenuhnya. Dari perspektif pelayanan publik sebagai proses sosial, SIMKIM berpotensi mengubah dinamika interaksi antara petugas dan masyarakat. Kemudahan akses informasi dan transparansi proses [12] dapat mengurangi asimetri informasi dan potensi terjadinya bias. Namun, di sisi lain, ketergantungan yang tinggi pada sistem juga dapat mengurangi fleksibilitas petugas dalam menangani situasi-situasi unik atau menciptakan "jarak" interaksional jika antarmuka sistem tidak dirancang secara intuitif bagi pengguna layanan. Literatur yang dikaji hingga saat ini belum banyak mengeksplorasi dimensi pengalaman individual dan interaksi sosial ini secara mendalam dalam konteks penggunaan SIMKIM. Dalam hal pengawasan keimigrasian, ketersediaan data WNA yang lebih valid dan terpusat melalui SIMKIM [14] serta integrasinya dengan sistem pendukung lain seperti Border Control Management (BCM) dan aplikasi I-24/7 Interpol [15, 16] jelas merupakan langkah maju yang signifikan. Namun, efektivitas akhir dari fungsi pengawasan tetap sangat bergantung pada kompetensi petugas dalam memanfaatkan data tersebut dan kemampuan untuk mengatasi berbagai kendala teknis serta koordinatif yang ada [4, 16]. Peran data intelijen yang efektif [16] juga menegaskan bahwa SIMKIM hanyalah salah satu komponen, meskipun penting, dalam sebuah ekosistem pengawasan keimigrasian yang lebih luas dan kompleks.

4. Berdasarkan sintesis literatur yang telah dilakukan, SIMKIM menunjukkan efektivitas parsial dalam aspek pelayanan keimigrasian, terutama terkait peningkatan efisiensi administratif dan transparansi informasi. Namun, efektivitas ini belum merata dan masih dibayangi oleh kendala infrastruktur, kapasitas SDM, dan tantangan adaptasi teknologi, khususnya di daerah-daerah tertentu. Dalam domain akurasi dan efektivitas pengawasan, SIMKIM telah memberikan kontribusi melalui penyediaan data yang lebih terpusat dan

integrasi dengan sistem deteksi dini. Meskipun demikian, kemampuannya dalam mendukung deteksi pelanggaran yang lebih kompleks, seperti pemalsuan dokumen, serta pemanfaatan fitur analitik data untuk pengawasan yang bersifat proaktif dan prediktif, masih menjadi area yang memerlukan pengembangan dan optimalisasi lebih lanjut. Berbagai tantangan teknis dan masalah koordinasi antar lembaga juga teridentifikasi sebagai faktor yang membatasi pencapaian efektivitas pengawasan secara maksimal. Kesenjangan yang signifikan dalam literatur yang ada adalah kurangnya studi empiris kualitatif yang secara spesifik dan mendalam mengeksplorasi pengalaman dan persepsi langsung dari para petugas imigrasi di berbagai tingkatan fungsional serta pengguna layanan (baik WNA maupun penjamin) terhadap implementasi SIMKIM dalam konteks operasional sehari-hari. Bagaimana dinamika sosial dan organisasional yang unik di masing-masing kantor imigrasi mempengaruhi proses adopsi dan pemanfaatan SIMKIM? Strategi adaptasi apa yang dilakukan oleh petugas untuk mengatasi kendala teknis dan non-teknis yang mereka hadapi di lapangan? Aspek-aspek inilah yang menjadi krusial untuk digali lebih lanjut melalui penelitian empiris kualitatif, guna melengkapi dan memperdalam pemahaman yang telah diperoleh dari studi pustaka ini, sekaligus memberikan dasar yang lebih kokoh untuk perumusan rekomendasi kebijakan yang relevan dan kontekstual.

SIMPULAN

SIMKIM terbukti meningkatkan efisiensi layanan dan akurasi pengawasan keimigrasian melalui sistem yang terpusat dan terintegrasi. Namun, implementasinya belum optimal karena hambatan infrastruktur, keterbatasan SDM, resistensi perubahan, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Beberapa layanan masih bersifat manual dan kemampuan analitik sistem perlu ditingkatkan. Evaluasi berkala, peningkatan kompetensi petugas, pemerataan infrastruktur, serta integrasi sistem lintas instansi diperlukan untuk memaksimalkan potensi SIMKIM. Selain itu, dibutuhkan studi kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman pengguna dan petugas dalam operasional sehari-hari guna mendukung pengembangan yang lebih responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319. [Amerika Serikat: MIS Research Center].
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford: Oxford University Press.
- Gofur, A. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan. Depok: JRMB Fakultas Ekonomi UNIAT.
- Kristianingsih, Y. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna BPJS. Banjarmasin: Dunia Keperawatan.
- Kusuma, R. (2020). Evaluasi penerapan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) kantor imigrasi kelas I Yogyakarta: Pendekatan kualitatif. Yogyakarta: ABIS Journal.
- Mas'adi, D. R. A. (2024). Digitalisasi administrasi migrasi: Implementasi teknologi dalam pengelolaan imigrasi dan kependudukan. Jakarta: *Journal of Administrative and Social Science*.
- Murcahyo, F. H., & Subekti. (2023). Supervision and enforcement of immigration for foreigners who commit violations in Indonesian territory. Jakarta: *EQUALEGUM International Law Journal*.
- Noviana, K. K. (2025). Strategi komunikasi publik dalam implementasi pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Timur. Jakarta: *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*.
- Parwati, N., & Sushanti, S. (2023). Analisis peran model kontrol sirkuler imigrasi Indonesia sebagai upaya pencegahan tindakan terorisme. Jakarta: Syntax Idea.
- Pratama, D., Nulhaqim, S., & Basar, G. (2022). Sistem informasi manajemen dan pemanfaatannya pada organisasi pelayanan kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Kabupaten Bandung Barat. Bandung: *Share: Social Work Journal*.

- Rahmawati, L. A., & Hariani, D. (2018). Analisis penerapan e-government pada sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Semarang. Semarang: Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Sefitri, P. E., Aisyi, R., Rahma, S. I., & Hanoselina, Y. (2025). Penerapan sistem antrean online sebagai upaya peningkatan pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang. Padang: Jurnal Intelek Insan Cendikia.
- Simamora, A. P. P. (2023). Implementasi sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) terintegrasi sebagai jembatan keterkaitan praktik hukum bisnis dan hukum keimigrasian secara seimbang. Jakarta: UNES Law Review.
- Wijaya, B. K., Radhitya, M. L., Udayana, I. P. A. E. D., & Putra, I. M. Y. A. (2024). Pendampingan penerapan sistem informasi manajemen penilaian karyawan untuk peningkatan kinerja pada Hotel Bakung Sari Kuta. Bali: KOMET Journal.
- Wilonotomo, W., Putra, B., & Arifin, R. (2020). Rancangan sistem pendeteksian paspor palsu: Solusi pemeriksaan keimigrasian di Indonesia. Jakarta: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN).
- Wirata, A., Srijati, E., & Pamungkas, N. (2023). Implementasi pencegahan kejahatan transnasional di wilayah Indonesia melalui pendekatan hukum keimigrasian. Semarang: Jurnal Yustisiabel.
- Wibowo, N. S., Utomo, A. H., Antika, E., Gumilang, M. A., & Rosdiana, E. (2022). Pendampingan pengembangan aplikasi layanan terpadu Kelurahan Curah Grinting Kota Probolinggo untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Probolinggo: J-Dinamika.
- Yunita, R., Samsudin, S., & Putri, R. (2022). Sistem informasi geografis pemetaan warga negara asing. Pekanbaru: Rabbit Journal.
- Zulfikar, M. (2024). Penerapan hukum keimigrasian pada perbatasan negara di daerah terpencil kaitannya dengan teori ruang berada. Padang: UNES Law Review.